

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya. Bertolak dari hal itu, tidak hanya ekonomi yang meningkat, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri.<sup>1</sup> Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan perempuan untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan perempuan untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.<sup>2</sup>

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan, pemberdayaan harus dimulai dari keluarga. Pemberdayaan keluarga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud pemberdayaan sosial adalah bagaimana rumah tangga yang lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan, ketrampilan, ekonomi dan akses-akses lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hal. 37.

<sup>2</sup>Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal. 1-2.

<sup>3</sup>Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2002)

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Indonesia khususnya point 5 yang memiliki maksud untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan untuk mengembangkat bakat dan potensinya sehingga memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Pembangunan yang adil dan berkelanjutan harus menjamin akses perempuan ke sumber daya produktif dan hak partisipasi yang setara dengan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi, bermasyarakat, serta memiliki hak membuat keputusan dalam bidang publik dan swasta.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah agar setiap elemen masyarakat mampu diperdayakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, namun upaya tersebut tidak berjalan dengan mulus, sehingga setiap diadakannya program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, seolah menjadi program yang secara normativ mampu disikapi dengan minim. Pada kenyataan tingkat kemampuan masyarakat di wilayah seluruh wilayah Indonesia belum tercapai. Bahkan pada sisi lain, pemberdayaan perempuan merupakan tolak ukur keberhasilan program yang secara kuantitatif mampu memenuhi harapan dari pemerintah pusat. Menurut Isbandi Rukminto Adi, tahapan-tahapan pemberdayaan terbagi menjadi tujuh tahap yaitu: 1. Tahap persiapan, 2. Tahap assesment, 3. Tahap perencanaan, 4. Tahap formulasi, 5. Tahap pelaksanaan, dan 6. Tahap terminasi.<sup>4</sup>

Selama ini program-program yang dilakukan untuk memberdayakan perempuan bahkan untuk masyarakat luas belum terpenuhi, karena berbagai

---

<sup>4</sup>Aziz Muslim, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudera Baru, 2010), hal. 35-37

macam kendala yang tidak bisa diurai, karena berhubungan dengan informasi yang diterima oleh masyarakat seutuhnya. Tingkat kemiskinan masyarakat dapat dikurangi dengan melakukan percepatan melalui penanggulangan kemiskinan dengan mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat dari yang bersifat *top down* menjadi *bottom up*, dengan bertumpu pada kekuatan sumberdaya lokal.<sup>5</sup>

Hasil penelitian Rosalia Indriyati Septaningsih menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui pelatihan ketrampilan yang disesuaikan dengan potensi lokal dapat meningkatkan motivasi untuk membentuk usaha ekonomi produktif. Melalui penyandaran lingkungan hidup kelompok mampu mengembangkan diversifikasi olahan pangan berbahan dasar lokal.<sup>6</sup> Hasil penelitian Amin Kuncoro dan Kadar menunjukkan bahwa kelompok usaha bersama merupakan wadah untuk tempat berbagi ilmu tentang pemberdayaan dan kreatifitas warga. Selain itu, kelompok usaha bersama mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh warga masyarakat terlebih keluarga yang berpartisipasi didalamnya dalam hal peningkatan kehidupan.<sup>7</sup>

Pancasila dan UUD 1945 telah mengamanatkan penanganan kemiskinan kepada Negara. Negara dituntut komitmennya untuk mengurus masalah kemiskinan, sehingga kehadiran Negara ditengah-tengah permasalahan masyarakat menjadi nyata. Amanat Negara dala, konstitusi kepada Pemerintah

---

<sup>5</sup>Roni Ekha Putra, *Analisis terhadap Program-Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, (Jurnal Demokrasi UNP, vol 6, 2007), hal. 37-62

<sup>6</sup>Rosalia Indriyati S, *Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan*, (Jurnal seminar nasional Universitas PGRI Yogyakarta, 2015), hal. 512-524

<sup>7</sup>Amin Kuncoro & Kadar, *Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga*, (Jurnal Buana Gender, Vol 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016), hal. 45-54

untuk mengurus rumah tangga miskin melalui kebijakan, program dan aksi kegiatan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta keparahan dan kedalaman kemiskinan. Sehingga akan tercapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang sesungguhnya dengan indikator pertumbuhan ekonomi tinggi, diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan dan disparitas serta kesenjangan (*gap*) semakin rendah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat khususnya yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*) dan pengarus utamaan gender. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode 2015-2019, dimana Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak" dan dengan misi "Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama *Wong Cilik*".

Fenomena yang sering dikenal sebagai kemiskinan yang terdapat pada peningkatan populasi perempuan yang berada di bawah garis kemiskinan serta semakin tumbuh dan akutnya kondisi kemiskinan yang terjadi pada keluarga dengan kepala rumah tangga perempuan memerlukan upaya khusus dalam rangka penanganannya. Masalah lain yang dihadapi oleh kepala rumah tangga perempuan itu sendiri dikarenakan KRTP memikul sendiri beban ekonomi keluarga, selain bekerja harus mengurus anak. Diskriminasi perempuan terhadap akses permodalan, upah kerja, dan kepemilikan property. Selama ini dirasa sasaran program penanggulangan kemiskinan tidak fokus dan tidak

berbasis pada data base. Penanggulangan program kemiskinan selama ini cenderung bersifat homogen (model penanggulangan cenderung bersifat homogen, sama rata tanpa memperhatikan karakteristik rumah tangga sasaran). Bantuan program selama ini cenderung bersifat *top down* (cenderung sesuai keinginan pemberi bantuan, rumah tangga sasaran hanya sebagai objek program). Hasil penelitian Hastuti & Diah Respati menunjukkan bahwa diperlukannya model pemberdayaan perempuan agar secara aktif mampu berpartisipasi dalam pemanfaatan sumberdaya pedesaan, penguatan perempuan miskin merupakan inti pemberdayaan perempuan dan akan optimal apabila perempuan diberi kesempatan setara dengan laki-laki dalam pemanfaatan sumberdaya di pedesaan.<sup>8</sup>

Dalam rangka menangani hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merancang program khusus yaitu Program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera), program Jalin Matra ini merupakan kelanjutan dari program Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan) yang dilaksanakan pada periode 2009-2014. Didalam program Jalin Matra terdapat tiga program unggulan yaitu Program Jalin Matra bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK), dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), program Jalin Matra ini launching pada tanggal 26 Desember 2014 dan akan dilaksanakan pada masa kerja tahun 2015-2019.

---

<sup>8</sup>Hasti & Diah Respati, *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Pedesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan*, (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta), hal. 1-16

Namun tidak semua program Jalin Matra disalurkan ke setiap kabupaten sasaran. Dibawah ini adalah uraian kecamatan dan desa yang ada di Tulungagung sebagai penerima bantuan program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur tahun 2018:

Tabel 1.1

Uraian Kecamatan dan Desa Penerima Bantuan Program Jalin Matra  
Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung

No	Kecamatan	Desa	Jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran)	Bentuk Program Jalin Matra
1	Besuki	Besole	31	PFK
2	Besuki	Tanggungkandung	21	PFK
3	Bandung	Mergayu	19	PFK
4	Pakel	Gombang	19	PFK
5	Pakel	Gempolan	21	PK2
6	Tanggunggunung	Ngrejo	32	PFK
7	Tanggunggunung	Jengglunharjo	38	PFK
8	Tanggunggunung	Kresikan	45	PFK
9	Tanggunggunung	Tanggunggunung	19	PFK
10	Tanggung Gunung	Ngepoh	22	PFK
11	Tanggung Gunung	Tenggarejo	27	PFK
12	Kalidawir	Ngubalan	19	PFK
13	Pucang Laban	Sumberbendo	19	PFK
14	Pucang Laban	Panggunguni	20	PFK

15	Rejotangan	Karangsari	33	PFK
16	Rejotangan	Tugu	25	PFK
17	Rejotangan	Sukorejo Wetan	40	PFK
18	Rejotangan	Tenggur	24	PFK
19	Rejotangan	Buntaran	19	PFK
20	Rejotangan	Ariyojeding	31	PFK
21	Rejotangan	Rejotangan	20	PFK
22	Rejotangan	Tanen	20	PK2
23	Ngunut	Sumberejo Kulon	23	PFK
24	Ngunut	Pulosari	20	PK2
25	Sumbergempol	Podorejo	24	PFK
26	Sumbergempol	Mirigambar	33	PFK
27	Sumbergempol	Tambakrejo	24	PFK
28	Sumbergempol	Wonorejo	27	PFK
29	Sumbergempol	Bendiljati Kulon	22	PFK
30	Sumbergempol	Jabalsari	21	PFK
31	Sumbergempol	Sambirobyong	23	PFK
32	Sumbergempol	Bukur	22	PFK
33	Kedungwaru	Ringinpitu	29	PFK
34	Kedungwaru	Plosokandang	31	PK2
35	Ngantru	Pucung Lor	20	PFK
36	Ngantru	Padangan	26	PFK
37	Ngantru	Pojok	29	PFK
38	Ngantru	Kepuhrejo	19	PFK

39	Ngantru	Kepuhrejo	19	PK2
40	Kauman	Pucangan	30	PFK
41	Kauman	Bolorejo	25	PFK
42	Kauman	Batangsaren	27	PFK
43	Kauman	Sidorejo	20	PFK
44	Kauman	Mojosari	25	PFK
45	Kauman	Kates	41	PFK
46	Gondang	Rejosari	19	PFK
47	Pagerwojo	Penjor	27	PFK
48	Pagerwojo	Kradinan	22	PFK
49	Pagerwojo	Gambiran	24	PK2
50	Sendang	Krosok	30	PK2
51	Sendang	Tugu	38	PK2
52	Sendang	Picisan	24	PK2
53	Sendang	Sendang	24	PK2
54	Boyolangu	Beji	30	PK2
55	Kalidawir	Karangtalun	28	PK2
56	Karangrejo	Jeli	22	PK2

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tulungagung*

***Keterangan:***

RTSM : JALIN MATRA Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin.

PFK : JALIN MATRA Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan.

PK2 : JALIN MATRA Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tulungagung



Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua program Jalin Matra disalurkan ke setiap kabupaten sasaran, misalnya saja Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung hanya menerima bantuan program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2). Untuk penerimaan bantuan PFK di Tulungagung ada 48 desa dari 15 kecamatan yang masuk dalam katerogi PFK, sementara untuk kategori PK2 ada 8 desa dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung, desa-desa yang ditunjuk mendapatkan program Jalin Matra ini sudah ditentukan oleh Pemprov Jatim. Bantuan yang digulirkan Pemprov Jatim ini tidak berbentuk uang tunai, namun berupa modal senilai Rp. 2.500.000 yang akan dipergunakan untuk mengembangkan kreatifitas sasaran program.<sup>10</sup>

Untuk menangani kemiskinan perempuan, terutama untuk kepala keluarga yang dikepalai oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP), program PFK ini tidak hanya sebagai upaya jangka pendek, tetapi terlebih daripada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (*proverty trap*) pada KRTP.<sup>11</sup> Terdapat kriteria umum dan khusus untuk penerima program adalah rumah tangga yang memiliki status kesejahteraan 10% terendah berdasarkan pemutakhiran data terpadu (PDBT) tahun 2015, rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan, KRTP yang memiliki ART berusia produktif (15-65) tahun atau KRTP sebatang kara berusia produktif, dalam satu desa terdapat lebih dari 10 KRTP dan atau diprioritaskan

---

<sup>10</sup>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tulungagung.

<sup>11</sup>Pedum Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2016, hal. 7

lebih dari 20 KRTP. Sedangkan kriteria khususnya adalah: bercerai, suami meninggal, diterlantarkan suami selama 6 bulan, suami difabel atau sakit menahun.

Beberapa indikator keberhasilan program yang digagas pemerintah diantaranya yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat pemanfaatan. Untuk mencapai indikator keberhasilan tersebut, Pemprov Jatim bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten atau Kota, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan kader PKK, Perguruan Tinggi, dan tim penggerak PKK (Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan Desa).<sup>12</sup>

Berangkat dari konstruksi konteks penelitian di atas, maka kemudian peneliti ingin mengetahui kondisi permasalahan kemiskinan, bentuk pendampingan dan bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui program Jalin Matra di Desa Rejosari yang akhirnya peneliti mengangkat judul penelitian "*Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program Jalin Matra di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung*"

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka fokus penelitian yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana permasalahan kemiskinan yang terjadi di Desa Rejosari?
2. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan melalui program jalin matra di Desa Rejosari?

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 15-23

3. Bagaimana pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui program jalin matra di Desa Rejosari?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permasalahan kemiskinan yang terjadi di Desa Rejosari.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan melalui program jalin matra di Desa Rejosari.
3. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui program jalin matra di Desa Rejosari.

### **D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka ruang lingkup masalah penelitian ini hanya khusus membahas tentang pemberdayaan ekonomi perempuan yang dikepalai oleh kepala rumah tangga perempuan (KRTP) yang berkategori miskin, karena mereka harus memikul beban ekonomi keluarga serta harus mengurus anggota keluarga secara bersamaan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Diantaranya adalah manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Sementara itu, untuk penjabaran manfaat atau guna dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan metodologi pelaksanaan serta menambah khazanah keilmuan dari peneliti maupun pembaca terkait dengan hal pemberdayaan ekonomi perempuan.

### **2. Manfaat Praktis**

Kegunaan praktis dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

#### **a. Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada para mahasiswa dalam menghadapi segala problematika khususnya dalam menangani problematika perempuan. Selain hal tersebut, juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk memperkaya koleksi pustaka di perpustakaan.

#### **b. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Hasil dari penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang serupa dan mampu meningkatkan kualitas penelitian sehingga dapat menjadi lebih baik lagi.

c. Bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP)

Kontribusi penelitian ini bagi para kepala rumah tangga perempuan bersifat non-material. Namun, beberapa data yang disuguhkan pada penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi, bahwa masih banyak program bantuan perekonomian bagi kelompok sosial kelas menengah kebawah seperti beberapa kasus feminisasi kemiskinan, perempuan mendapatkan akses bantuan tersebut. Sehingga, Perempuan yang berstatus sebagai kepala keluarga tidak mengalami beban ganda pada hal ekonomi.

d. Bagi Instansi atau Pemegang Kebijakan

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau input untuk pemerintah sebagai analisis problem dalam masyarakat. Dimana, problematika yang dihadapi oleh perempuan yang begitu kompleks dan cenderung luput dari kalkulasi rancangan program atau kebijakan di daerah.

## F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjelasan terhadap istilah-istilah pokok (*key term*) yang mencerminkan abstraksi masalah penelitian yang perlu dijelaskan atau ditegaskan<sup>13</sup>. Penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Program Jalin Matra di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung” kiranya perlu diperjelas beberapa bagian yaitu:

---

<sup>13</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 45

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, dan bersinergi mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif,<sup>14</sup> meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*).<sup>15</sup> Pendapat lain menjelaskan pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.<sup>16</sup>

### b. Ekonomi Keluarga

Secara bahasa ekonomi keluarga terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ekonomi merupakan tingkah laku manusia secara individu atau bersama-sama dalam menggunakan faktor-faktor yang mereka butuhkan. Adapun keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik

---

<sup>14</sup>Suhendra, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 74-75

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 77

<sup>16</sup>Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 169

anak dan mendorong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang telah lanjut usia. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga adalah kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya.<sup>17</sup>

c. Jalin Matra

Program yang didesain khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan bagi rumah tangga miskin dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) Tujuan Penanggulangan Kemiskinan antara lain: memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK sebagai *mother care* bagi KRTP, memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan terhadap usaha produktif untuk peningkatan aset usaha/pendapatan keluarga, membantu mendorong ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, dan mendorong motivasi berusaha dan life skill KRTP dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Scribd, "Pengertian Ekonomi Keluarga", diakses melalui (<http://www.scribd.com/doc/297694234/Pengertian-Ekonomi-Keluarga>) pada tanggal 28 Oktober 2018 pukul 20.13 WIB

<sup>18</sup>DRD Provinsi Jawa Timur. 2018. Pedoman Umum Tahun 2017 JALIN MATRA. Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## 2. Penegasan Operasional

Skripsi dengan judul “*Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Program Jalin Matra di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung*” merupakan salah satu upaya menganalisis kembali program yang dibuat oleh negara sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan pada perempuan secara struktural. Proses pelaksanaan dan formulasi PFK JALIN MATRA berprinsip pada perspektif gender, partisipasi deliberatif, keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, beraspek human governance dan keterpaduan. PFK JALIN MATRA dilaksanakan dengan kegiatan di dalamnya mencakup pendataan rumah tangga miskin berkepala rumah tangga perempuan.

### G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah memahami isi skripsi ini lebih dahulu penulis sajikan sistematika penulisan dengan uraian sebagai berikut:

**BAGIAN AWAL** terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

**BAB I : PENDAHULUAN**, berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II : KAJIAN TEORI**, berisi teori pemberdayaan, ekonomi keluarga dan Penelitian terdahulu.



**BAB III : METODE PENELITIAN**, berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan subyek penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN**, berisi paparan data, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.**

**BAB VI : PENUTUP**, berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan. Bagian akhir meliputi: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian dan daftar riwayat hidup